

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busro, 1985, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Abdul Muis BJ, 2021. *Pemberantasan Korupsi*, Bandung, Pustaka Reka Cipta.
- Adami Chazawi, 2011. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Banyumedia Publishing.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Garafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Buchari Said, 2015, *Hukum Pidana Materil*, Bandung, Fakultas Hukum UNPAS.
- Chaerudin, dkk. 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama.
- Djisman samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung; Nuansa Aulia.
- Utrecht, Moh Saleh Djindang, 1985, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana I*, Jakarta. PT. Ichtiar Baru.

- Utrecht, Moh Saleh Djindang, 1985, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Sopramono, 1999, *Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan.
- Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena.
- Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Rajawali Pers.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- M. Yahya Harahap, 2008, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Jakarta, Sinar grafika.
- Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997 *Bunga Rampai Korupsi Jakarta*, Cet. Ke-3, LP3ES.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rhineka.
- Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, laksana mediatama.

- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1985, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Media Kencana.
- Sastra Djatmika,dan Marsono, 1987, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Sudarto,1990, *Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Yayasan Sudarto.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tolib Effendi, 2014, *dasar-dasar hukum acara pidana; Perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*, Malang, setara press.

## **B. Jurnal/Skripsi/Tesis**

- A. Triana Ohoiwutun, 2015, *Kesaksian Ahli Jiwa Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat (Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB)*, Komisi Yudisial, Volume 8, No. 1

- Anjuandi Saragih, Sohibul Ihsan, 2022, *The Basic For The Judge's Consideration Of Acquitting The Perpetrators Of Corruption Crime*, Jurnal Corruptio, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, Vol. 3, Issue 1.
- Annisa Ghitha Ashila M, 2022, *Analisis Terhadap Putusan Bebas Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Pandeglang Banten*, Bandung Conference Series Law Studies, Vol. 2, No. 1.
- Arief Rahman Tanjung dan Yuherman, 2019, *Analisa Yuridis Terhadap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Terkait Dengan Hubungan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg)*, Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2.
- Bayu Prasetyo, dkk, 2021, *Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian*, Jurnal Palar, Vol. 7, No. 2.
- Benny Irawan, 2011. *Diskresi sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi dan Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas*, Mimbar Vol. XXVII. No. 2.
- Bernat Panjaitan, 2015, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)* Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 3 No. 02.

- Chairul Nopriansyah, 2020, *Juridical Analysis of the Acquittal in a Murder Crime*, Jurnal Of World Conference, Vol. 2, No. 3.
- Disiplin F. Manan, 2018, *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 1.
- Ewaldo Aziz, 2022, *Analisis Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
- Fitri Rahmadhani Muvariz, 2019 *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Ida Ayu Nyoman SCP, 2017, *Akibat Hukum Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Bagi Warga Negara Asing (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 748/Pid.Sus/2016/PN DPS)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 3.
- Indra Kumalasari Munthe, 2018. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Universitas Islam Sumatera Utara.

- Jhon Pratama Putra, 2021, *Alasan Hakim Memberikan Putusan Bebas Kepada Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kurnianas, dkk, 2022, *Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Yang Mendapatkan Putusan Bebas*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 20, No. 2.
- Listiyono Santoso, Dewi Meyriswati & Ilham Nur Alfian, 2014. *Korupsi dan Mentalitas: Kendala Kultural dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Masyarakat Kebudayaan dan Politik, Universitas Airlangga.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Renno Aldianto, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Naomi Sari Kristiani, dkk, 2020, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn*, Sign Jurnal Hukum, Vol. 2, No.1.

- Ni Gusti Made Utami, 2019, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Odie Faiz Guslan, 2018. *Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Jurnal Cendikia Hukum, Vol. 4 No.1.
- Ryan Pratama, 2017, *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Memiliki Kecukupan Alat Bukti (Analisis Putusan No. 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN.BNA)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sulardi Sulardi & Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak: Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt. Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Vol. 8, No. 3.
- Syamsul Bahri, 2017, *Wawasan Al Qur'an Tentang Pemberantas Korupsi dalam Ar-Raniry*, *International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2.
- Theresia Ngutra, 2017, *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Jurnal Supremasi, Universitas Negeri Makassar.
- Yonathan Sebastian Laowo, 2018, *Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 4, No. 1.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana